

Dampak Kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya Kementerian ESDM terhadap Aktivitas Operasional PT. Borneo Angkasa Jaya

The Impact of the Ministry of Energy and Mineral Resources' Activity Plan and Cost Budget Policy on the Operational Activities of PT. Borneo Angkasa Jaya

Khairiani Nur Adhelia¹, Andra Sulindrina²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: andrasulindrina@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis dampak kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap aktivitas operasional PT. Borneo Angkasa Jaya serta implikasinya terhadap tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian literature. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan RKAB berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan. Perubahan sistem dari multi-tahun menjadi tahunan serta pembatasan target produksi menyebabkan fluktuasi dan penurunan produksi pada periode 2024–2025. Dampak tersebut tercermin pada penurunan aktivitas operasional, seperti berkurangnya penggunaan alat berat, penyesuaian jam kerja, dan menurunnya intensitas pertambangan. Selain itu, kebijakan RKAB juga berdampak tidak langsung terhadap tenaga kerja melalui perubahan pola kerja dan peningkatan efisiensi sumber daya manusia. Kebijakan RKAB menjadi faktor eksternal utama yang mempengaruhi produksi, aktivitas operasional, dan tenaga kerja, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi perusahaan serta kebijakan yang lebih stabil dari pemerintah.

Abstract

The study aims to analyze the impact of the Work Plan and Budget (RKAB) policy issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources on the operational activities of PT. Borneo Angkasa Jaya and its implications for labor. A descriptive qualitative approach is used, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the RKAB policy significantly affects company operations. The shift from a multi-year to an annual system, along with production limitations, leads to fluctuations and a decline in production during 2024–2025. These impacts are reflected in reduced operational activities, including decreased use of heavy equipment, adjusted working hours, and lower mining intensity. The policy also indirectly affects labor through changes in work patterns and workforce efficiency. RKAB functions as a key external factor influencing production, operational activities, and labor, highlighting the need for greater company adaptability and more stable government policies.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Khairiani Nur Adhelia, Andra Sulindrina.

Article history

Received 2026-02-16

Accepted 2026-04-15

Published 2026-04-30

Kata kunci

RKAB;
Kebijakan ESDM;
Aktivitas Operasional;
Tenaga Kerja.

Keywords

RKAB;
ESDM policy;
Operational Activities;
Labor.

PENDAHULUAN

Kebijakan sektor pertambangan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah instrumen penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan tambang. RKAB berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan operasional serta sebagai alat untuk mengontrol pelaksanaan produksi dan biaya selama periode tertentu. Dalam praktiknya, RKAB tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar untuk menetapkan batasan produksi, pengaturan sumber daya, dan strategi operasional perusahaan tambang. Hal ini sejalan dengan penelitian Djamaac W et al. (2024) yang menunjukkan bahwa anggaran memiliki fungsi strategis sebagai alat perencanaan dan kontrol dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Dalam konteks kebijakan terbaru, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan perubahan penting terhadap mekanisme RKAB. Pada tahun 2025, sistem RKAB masih berada dalam fase transisi dengan pendekatan yang cukup fleksibel. Namun, mulai tahun 2026, kebijakan RKAB akan diterapkan kembali secara tahunan dengan pengawasan yang lebih ketat. Perubahan ini bertujuan untuk mengatur produksi sumber daya mineral dan batubara agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang dapat menyebabkan penurunan harga pasar dan memperlemah ketahanan cadangan nasional. Selain itu, pemerintah juga menetapkan batas relaksasi hingga 31 Maret 2026, di mana setelah periode tersebut seluruh perusahaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan baru secara penuh.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan RKAB dan Target Produksi Batubara

Tahun	Target Produksi Nasional	Target DMO (Domestic Market Obligation)	Keterangan
2025	± 1,2 miliar ton	254 juta ton	Target produksi masih relatif tinggi
2026	Disesuaikan (lebih rendah dari 2025)	247,9 juta ton	Penurunan untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan

Sumber: Diolah dari data Kementerian ESDM dan berbagai sumber (2025-2026)

Tabel diatas memperlihatkan adanya perubahan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari sistem tiga tahunan pada tahun 2025 menjadi sistem tahunan pada tahun 2026, yang berdampak pada penyesuaian target produksi batubara secara keseluruhan. Pada tahun 2025, target produksi masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,2 miliar ton dengan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 254 juta ton. Namun, pada tahun 2026 pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan penurunan target produksi serta DMO menjadi 247,9 juta ton sebagai upaya menjaga kestabilan harga batubara dan keberlanjutan ketersediaan cadangan.

Selain itu, kebijakan terbaru juga menunjukkan adanya percepatan dalam proses pengajuan RKAB, di mana penyusunan dan pengajuan RKAB tahun 2026 telah dimulai sejak Oktober 2025. Percepatan ini menandakan adanya perubahan dalam mekanisme perencanaan yang menuntut perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi terhadap kebijakan yang ditetapkan. Perubahan tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang lebih responsif, serta memberikan implikasi langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan pertambangan.

Dalam implementasinya di lapangan, kebijakan RKAB tidak diterapkan secara merata kepada seluruh pelaku usaha pertambangan, melainkan memiliki cakupan pihak yang secara langsung dan tidak langsung terdampak. Kebijakan RKAB diterapkan langsung kepada perusahaan yang memegang IUP OP sebagai pemilik izin untuk menjalankan usaha pertambangan yang memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan produksi. Dalam konteks ini, perusahaan kontraktor seperti PT Borneo Angkasa Jaya tidak secara langsung termasuk dalam pihak yang diatur, tetapi tetap terpengaruh secara tidak langsung akibat perubahan target produksi, volume pekerjaan, dan penyesuaian kegiatan operasional yang ditetapkan oleh pemilik IUP OP.

Dampak dari kebijakan tersebut juga dirasakan pada tingkat daerah, terutama di wilayah penghasil batubara utama seperti Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur

adalah salah satu wilayah yang paling besar dalam produksi batubara di Indonesia menyumbang sekitar 67% dari total produksi nasional dan memberikan kontribusi penting bagi total produksi negara. Menurut data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (2026), jumlah batubara yang diproduksi di Kalimantan Timur terus berubah-ubah akibat kebijakan pemerintah yang dinamis dan keadaan pasar global. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan membuat kebijakan RKAB memberikan dampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tambang di area ini. Produktivitas dalam sektor pertambangan batubara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan alat berat, tenaga kerja, struktur geologi, serta peraturan pemerintah mengenai batasan produksi. RKAB berfungsi sebagai alat utama yang menentukan seberapa produktif suatu perusahaan karena memuat rencana produksi yang harus diikuti. Jika ada pembatasan produksi akibat kebijakan, maka hal itu akan berdampak langsung pada jumlah hasil yang dihasilkan perusahaan. Sebaliknya, apabila target produksi dinaikkan, perusahaan harus berusaha meningkatkan efisiensi dan kemampuan operasionalnya.

Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu masyarakat dan memenuhi tujuan tertentu. Kebijakan ini tidak hanya berupa peraturan yang ditulis tetapi juga melibatkan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan Arafat (2024) dalam buku Kebijakan Publik: Teori dan Praktik, proses kebijakan publik adalah sesuatu yang dinamis yang meliputi langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan, hingga penilaian. Keberhasilan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi serta kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam penelitian ini, kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM merupakan contoh kebijakan publik yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Teori Manajemen Operasi

Manajemen operasi adalah proses yang mengatur pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan barang atau layanan dengan cara yang tepat dan efisien. Aktivitas ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kontrol dari proses produksi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.

Menurut William J. Stevenson (2021) dalam bukunya Operations Management, manajemen operasi merupakan sistem yang menangani proses pengubahan input menjadi output dengan memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, alat, dan teknologi. Pengelolaan yang efisien akan berkontribusi pada peningkatan performa operasional.

Dalam dunia perusahaan pertambangan, manajemen operasi berhubungan dengan kegiatan produksi, pemakaian alat berat, serta optimasi sumber daya. Keberhasilan manajemen operasi akan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target produksi perusahaan. Penerapan teori manajemen operasi sangat relevan dalam penelitian ini karena perubahan dalam kebijakan RKAB mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan dari aktivitas operasional. Teori ini memungkinkan analisis tentang bagaimana perubahan kebijakan tersebut berdampak pada efisiensi produksi, penggunaan alat, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Teori Produktivitas

Produktivitas adalah salah satu indikator penting dalam mengevaluasi performa sebuah organisasi, terutama dalam aspek produksi. Konsep ini mencerminkan sejauh mana sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil yang optimal.

Muchdarsyah Sinungan (2016) dalam karyanya yang berjudul *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*, mendefinisikan produktivitas sebagai rasio antara hasil yang diperoleh dan total sumber daya yang digunakan selama proses produksi. Ini bukan hanya soal volume output, tetapi juga menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan input, termasuk tenaga kerja, waktu, dan alat.

Tingginya produktivitas menunjukkan bahwa sebuah organisasi berhasil mengelola sumber daya dengan baik untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh. Sebaliknya, rendahnya produktivitas menjadi indikasi adanya ketidakefisienan dalam proses produksi yang dapat berdampak pada performa perusahaan. Dalam sektor perusahaan pertambangan, produktivitas sangat terkait dengan pencapaian target produksi batubara, yang melibatkan tenaga kerja.

Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam proses produksi, berfungsi untuk menggerakkan berbagai aktivitas perusahaan. Keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada sejauh mana tenaga kerja dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan efisien. Tanpa jumlah tenaga kerja yang tepat, proses produksi tidak akan berjalan secara optimal, sehingga pencapaian tujuan organisasi akan terhambat.

Sonny Sumarsono (2019) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* mengungkapkan bahwa tenaga kerja merujuk kepada individu-individu yang berada dalam rentang usia produktif dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa. Analisis mengenai tenaga kerja tidak hanya berfokus pada jumlah yang tersedia, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor kualitas, keterampilan, dan tingkat partisipasinya dalam proses produksi. Ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas produksi; kualitas dan kompetensi tiap individu juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Pengelolaan tenaga kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, sementara pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan inefisiensi dan pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap tenaga kerja adalah hal-hal krusial yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan untuk menjaga produktivitas.

Dalam sektor pertambangan, tenaga kerja memegang posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan operasional. Ciri-ciri industri pertambangan yang bergantung pada modal besar dan banyak tenaga kerja memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang tidak hanya memadai dari segi jumlah, tetapi juga menguasai keahlian teknis yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dari tahap eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga transportasi hasil tambang, semua itu memerlukan kontribusi tenaga kerja dengan berbagai tingkat keahlian.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Borneo Angkasa Jaya yang berperan sebagai kontraktor dalam bidang pertambangan.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 bersamaan dengan pelaksanaan program magang.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dampak kebijakan ESDM pada kegiatan operasional perusahaan.

Alat Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, serta akurat mengenai dampak kebijakan Kementerian ESDM terhadap operasional perusahaan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan situasi yang ada di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi, dan data yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti berusaha

untuk merinci perubahan yang terjadi dalam operasional, termasuk penyesuaian target produksi dan pengelolaan tenaga kerja sebagai respons terhadap kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Selain metode analisis deskriptif, penelitian ini juga mengaplikasikan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) sebagai alat bantu untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an dalam proyek riset di Stanford Research Institute, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis dalam suatu organisasi. Konsep SWOT kemudian banyak dikembangkan dan digunakan dalam manajemen strategis sebagai alat untuk merumuskan strategi organisasi.

Dalam kajian ini, penggunaan analisis SWOT bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kapasitas perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan RKAB. Melalui analisis ini, tidak hanya kondisi internal dan eksternal yang akan teridentifikasi, tetapi juga strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kebijakan RKAB

Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan pertambangan. RKAB memuat rencana produksi, penggunaan sumber daya, serta alokasi anggaran yang wajib dipatuhi oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Dalam perkembangannya, kebijakan RKAB mengalami perubahan signifikan, khususnya pada mekanisme penyusunannya. Pada periode sebelumnya, RKAB disusun dengan sistem jangka waktu tiga tahunan yang memberikan ruang perencanaan lebih panjang bagi perusahaan. Namun, mulai tahun 2026, pemerintah menerapkan kembali sistem RKAB tahunan dengan pengawasan yang lebih ketat. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol terhadap produksi mineral dan batubara, menjaga stabilitas harga pasar, serta memastikan keberlanjutan cadangan sumber daya alam.

Selain perubahan sistem, kebijakan RKAB juga menitikberatkan pada pembatasan kuota produksi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik dan kondisi global. Pemerintah menetapkan target produksi nasional serta kewajiban pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO), yang secara langsung mempengaruhi jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pembatasan ini, perusahaan tidak lagi memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan volume produksi, melainkan harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAB yang disetujui. Bagi PT Borneo Angkasa Jaya sebagai perusahaan kontraktor pertambangan, kebijakan RKAB menjadi acuan utama dalam menjalankan aktivitas operasional. Setiap perubahan dalam RKAB, baik terkait target produksi maupun mekanisme pelaksanaan, akan berdampak langsung pada perencanaan kerja, penggunaan alat berat, serta pengelolaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena kegiatan operasional perusahaan sangat bergantung pada volume produksi yang diizinkan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, alterasi dalam kebijakan RKAB berdampak pada variasi hasil produksi perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan kuota produksi yang diatur melalui RKAB menyebabkan perlunya penyesuaian dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk pengurangan frekuensi produksi serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Perusahaan diwajibkan untuk mengubah pola kerja operasional agar tetap bisa mencapai sasaran produksi secara efektif meskipun terikat pada batasan kuota yang berlaku. Dampak ini tidak hanya terlihat dalam aspek produksi, tetapi juga memengaruhi efisiensi pemakaian alat berat, pengaturan waktu kerja, dan tingkat produktivitas operasional di lapangan. Oleh karena itu, perusahaan harus rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk tetap dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang ada.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kebijakan RKAB memainkan peran penting dalam mengatur arah kegiatan operasional perusahaan pertambangan.

Perubahan pada sistem dan batasan produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah memaksa perusahaan untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas operasionalnya. Perusahaan perlu merancang strategi operasional yang lebih efisien dan efektif agar pemanfaatan sumber daya tetap maksimal dan produktivitas perusahaan dapat terjaga. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan RKAB juga merupakan faktor krusial dalam mempertahankan stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan regulasi pertambangan yang terus berkembang.

Target dan Realisasi Produksi

Tabel 2. Target dan Realisasi Produksi PT. Borneo Angkasa Jaya 2020-2025 (dalam ton)

Tahun	Target Produksi (MT)	Realisasi Produksi (MT)	Selisih	Keterangan
2021	300.000	301.260	+1.260	Melebihi target
2022	250.000	232.700	-17.300	Tidak tercapai
2023	330.000	340.999	+10.999	Produksi tertinggi
2024	260.000	241.930	-18.070	Mengalami penurunan
2025	200.000	184.285	-15.715	Penurunan signifikan

Sumber: Data internal PT. Borneo Angkasa Jaya

Catatan : MT (Metric Ton) = ton batubara

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa hasil produksi PT. Borneo Angkasa Jaya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah produksi mencapai 301.260 MT/tahun (ton batubara) dan sedikit melampaui target yang telah ditentukan. Namun, di tahun 2022, terjadi penurunan jumlah produksi menjadi 232.700 MT/tahun yang mencerminkan adanya penyesuaian dalam operasi. Pada tahun 2023, produksi mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah mencapai 340.999 MT/tahun, yang merupakan rekor tertinggi selama periode analisis. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang maksimal apabila tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan yang ada.

Akan tetapi, pada tahun 2024 dan 2025, produksi kembali mengalami penurunan menjadi 241.930 MT/tahun dan 184.285 MT/tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan produksi yang semakin ketat dan penyesuaian terhadap kebijakan RKAB yang lebih ketat.

Perubahan Aktivitas Operasional

Tabel 3. Perubahan Aktivitas Operasional (Produksi Rata-rata Harian ton/hari)

Tahun	Estimasi Hari Kerja	Produksi Harian (MT/Hari)	Keterangan
2021	300 hari	1.004	Aktivitas tinggi
2022	300 hari	776	Aktivitas menurun
2023	300 hari	1.137	Aktivitas tertinggi
2024	300 hari	806	Mulai dibatasi
2025	300 hari	614	Penurunan signifikan

Catatan : MT (Metric Ton) = ton batubara

Berdasarkan Tabel 3, aktivitas operasional perusahaan yang diukur melalui produksi harian rata-rata menunjukkan adanya perubahan dalam kondisi operasional yang terlihat di kolom keterangan. Pada tahun 2021, aktivitas perusahaan masih tergolong tinggi dengan volume produksi harian mencapai sekitar 1.004 MT. Keadaan ini memperlihatkan bahwa proses produksi, penggunaan alat berat, serta durasi kerja operasional masih berjalan dengan efisien.

Memasuki tahun 2022, terdapat penurunan dalam aktivitas operasional yang terlihat dari penurunan produksi harian menjadi sekitar 776 MT. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian pada tingkat produksi perusahaan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, perusahaan kembali mengalami puncak aktivitas operasional dengan produksi harian mencapai sekitar 1.137 MT. Keterangan "aktivitas tertinggi" menandakan bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan proses produksi, baik dari segi alat yang digunakan, tenaga kerja, maupun efektivitas operasional di lapangan.

Namun, pada tahun 2024, kondisi operasional mulai terbatas, terlihat dari penurunan produksi harian yang hanya sekitar 806 MT. Pembatasan ini mengindikasikan adanya pengurangan dalam intensitas kegiatan produksi sebagai respons terhadap kebijakan RKAB serta target produksi yang ditetapkan.

Kemudian, pada tahun 2025, terjadi penurunan yang lebih signifikan dengan angka produksi harian hanya sekitar 614 MT. Keterangan "penurunan signifikan" menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan mengalami penyesuaian yang lebih mendalam, baik dalam penggunaan alat berat, durasi kerja operasional, maupun tingkat produksi harian. Keadaan ini mencerminkan dampak dari kebijakan pembatasan produksi yang semakin berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Indikasi Dampak terhadap Tenaga Kerja

Selain berdampak pada produksi dan aktivitas operasional, hasil pengamatan juga menunjukkan adanya indikasi dampak terhadap tenaga kerja dengan adanya kemungkinan penyesuaian tenaga kerja akibat penurunan aktivitas produksi yang terjadi dalam periode tertentu.

Penurunan produksi yang terjadi pada tahun 2024 dan 2025 mempengaruhi berkurangnya kegiatan operasional di lapangan, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja operasional cenderung menyesuaikan. Kondisi ini tidak selalu berarti terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja secara langsung, tetapi lebih kepada perubahan pola kerja dan tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan produksi harian. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan efisiensi kerja, baik melalui pengurangan jam kerja, optimalisasi pembagian tugas, maupun penyesuaian penempatan tenaga kerja pada aktivitas yang dianggap lebih prioritas. Dengan demikian, perusahaan berusaha menjaga keseimbangan antara target produksi yang menurun dengan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di lapangan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini tenaga kerja tidak diukur secara kuantitatif. Perubahan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja turut terdampak sebagai konsekuensi dari penurunan aktivitas operasional. Hal ini dipahami sebagai dampak lanjutan (potential impact) dari perubahan aktivitas operasional akibat kebijakan RKAB, yang tercermin melalui perubahan intensitas kerja, efisiensi operasional, serta penyesuaian kebutuhan tenaga kerja ditingkat operasional.

Pembahasan

Analisis Kebijakan RKAB terhadap Perencanaan Produksi

Kebijakan RKAB yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki dampak signifikan dalam mengarahkan operasional perusahaan pertambangan. Pergeseran dari sistem RKAB yang berlaku untuk multi-tahun menjadi tahunan membuat perusahaan kehilangan kepastian dalam perencanaan produksi jangka menengah.

Dengan sistem yang lama, perusahaan mampu merencanakan strategi produksi untuk beberapa tahun ke depan dengan lebih konsisten. Namun, dengan adanya sistem tahunan, perusahaan harus memperbarui rencana produksi setiap tahun sesuai dengan persetujuan dari pemerintah. Ini berakibat pada meningkatnya ketidakpastian dalam perencanaan operasional.

Tabel 4. Perbandingan Sistem RKAB Multitahun dan Tahunan

Aspek	RKAB Multi-Tahun	RKAB Tahunan
Perencanaan Produksi	Jangka menengah (3 tahun)	Jangka pendek (1 tahun)
Stabilitas Produksi	Relatif stabil	Cenderung fluktuatif
Kepastian Target	Lebih pasti	Bergantung persetujuan tahunan
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi
Tingkat Pengawasan	Lebih longgar	Lebih ketat

Tabel diatas menunjukkan bahwa sistem RKAB multi-tahun memberikan stabilitas perencanaan, sedangkan sistem tahunan lebih fleksibel namun meningkatkan

ketidakpastian. Selain itu, sistem tahunan memiliki pengawasan yang lebih ketat sehingga membatasi produksi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi variasi produksi PT. Borneo Angkasa Jaya, serta sesuai dengan kondisi PT. Borneo Angkasa Jaya yang mengalami penyesuaian produksi akibat perubahan system RKAB. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang mengarahkan kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2016).

Dampak RKAB terhadap Produksi

Berdasarkan Tabel 4, fluktuasi dalam hasil produksi yang terlihat mengindikasikan adanya pengaruh langsung dari kebijakan RKAB terhadap kinerja produksi perusahaan. Perubahan angka produksi dari tahun ke tahun tidak menunjukkan pola yang konsisten, tetapi cenderung mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan perusahaan dalam menetapkan target produksi menjadi lebih terikat pada aturan yang ada.

Penurunan hasil produksi di tahun 2022 serta pada periode 2024–2025 mencerminkan adanya batasan produksi yang harus diikuti oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan RKAB yang ditentukan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya dapat mempertahankan tingkat produksi optimalnya ketika terdapat pembatasan dari sisi kebijakan. Meskipun begitu, penurunan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh penyesuaian strategi operasional untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, peningkatan produksi yang terjadi pada tahun 2023 lebih mencerminkan kemampuan internal perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi, seperti optimalisasi alat berat, efisiensi operasional, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, bukan karena adanya perubahan kebijakan yang lebih longgar. Dengan kata lain, peningkatan tersebut merupakan bentuk adaptasi dan usaha memaksimalkan kapasitas produksi dalam batasan yang masih memungkinkan. Namun setelah kebijakan diterapkan secara lebih ketat pada periode berikutnya, produksi kembali mengalami penurunan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan RKAB memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengatur dan membatasi tingkat produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan target produksi akan berdampak pada aktivitas operasional perusahaan, karena produksi menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional (Latunggamu et al., 2021; Lestari, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai faktor eksternal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor internal perusahaan dalam menentukan tingkat produksi. Setiap perubahan dalam kebijakan ini secara langsung terlihat pada perubahan pencapaian hasil produksi tahunan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui manajemen internal, ruang gerak masih terhambat oleh regulasi yang ada. Kebijakan RKAB berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian produksi yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk menyesuaikan berbagai strategi operasionalnya agar tetap selaras dengan aturan yang ditentukan. Alhasil, tingkat produksi yang direalisasikan bukan hanya merupakan hasil dari kapasitas dan kinerja internal, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan internal perusahaan dan batasan eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dampak RKAB terhadap Aktivitas Operasional

Dampak dari kebijakan RKAB terlihat tidak hanya dalam angka produksi, tetapi juga dalam kegiatan operasional di lapangan. Mengacu pada Tabel 4. 2, penurunan dalam produksi harian menunjukkan bahwa kegiatan operasional mengalami perubahan yang cukup besar dan meluas pada berbagai aspek pelaksanaan kerja.

Pada aspek pertama, pengurangan pemakaian alat berat terjadi karena menurunnya volume pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga intensitas penggunaan unit alat

seperti excavator, dump truck, dan alat pendukung lainnya menjadi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini secara langsung juga berdampak pada efisiensi biaya operasional dan perawatan alat. Pada aspek kedua, pengurangan jam kerja operasional menunjukkan adanya penyesuaian waktu kerja di lapangan, baik melalui pengurangan shift kerja maupun optimalisasi durasi operasional harian. Kondisi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap target produksi yang lebih rendah agar operasional tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, pada aspek ketiga yaitu penyesuaian tingkat aktivitas pertambangan, perusahaan melakukan pengaturan ulang pada intensitas kegiatan pertambangan di beberapa area kerja. Aktivitas tidak lagi dilakukan secara maksimal di seluruh titik tambang, melainkan disesuaikan dengan prioritas dan target produksi yang telah ditetapkan dalam RKAB.

Secara keseluruhan, perusahaan cenderung berupaya meningkatkan efisiensi operasional untuk beradaptasi dengan target produksi yang lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan dalam perencanaan produksi akan berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan (Lestari, 2016; Latunggamu et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan RKAB tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian produksi, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan arah dan intensitas kegiatan operasional perusahaan kontraktor.

Pengaruh RKAB terhadap Tenaga Kerja

Kebijakan RKAB tidak hanya berpengaruh pada hasil produksi dan kegiatan perusahaan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan keadaan tenaga kerja di dalam organisasi. Perubahan pada target produksi yang ditentukan melalui kebijakan ini memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai penyesuaian pada aktivitas operasional guna memastikan semuanya tetap mengikuti ketentuan yang ada. Penyesuaian tersebut tidak hanya memengaruhi proses produksi, tetapi juga berimbas pada manajemen sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas perusahaan.

Pengurangan dalam aktivitas operasional, seperti berkurangnya frekuensi produksi, minimnya penggunaan alat berat, serta perubahan pada jam kerja, secara tidak langsung berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja, khususnya bagi unit operasional lapangan. Saat intensitas produksi menurun, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan berkurang karena jumlah aktivitas yang dilakukan tidak sebanyak ketika produksi berjalan pada kapasitas normal atau tinggi. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya melaksanakan berbagai langkah efisiensi supaya operasional tetap bisa berjalan secara efektif dan biaya operasional dapat terkontrol.

Penyesuaian yang diterapkan perusahaan dapat mencakup pengaturan ulang jadwal kerja, pengurangan intensitas penggunaan alat berat, redistribusi tugas di antara pekerja, hingga pengoptimalan tenaga kerja yang ada supaya selalu sejalan dengan kebutuhan produksi. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menjadi lebih selektif dalam mengelola tenaga kerja operasional agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan jumlah pekerja yang diperlukan di lapangan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja menjadi salah satu elemen yang terpengaruh secara tidak langsung oleh kebijakan RKAB melalui perubahan dalam operasional perusahaan. Dalam hal ini, apabila tingkat produksi mengalami penurunan, maka permintaan akan tenaga kerja juga dapat berubah, baik dalam hal jumlah tenaga kerja, jam kerja, maupun distribusi tugas di lapangan. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perubahan dalam aktivitas operasional akan memengaruhi kebutuhan dan pengelolaan tenaga kerja di suatu perusahaan Lestari.

Selain berpengaruh terhadap aspek teknis pekerjaan, kondisi ini juga dapat mengganggu stabilitas tenaga operasional akibat penyesuaian dalam aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penurunan aktivitas produksi dalam rentang waktu tertentu mungkin menyebabkan berkurangnya intensitas kegiatan harian, sehingga perusahaan harus menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kestabilan tenaga kerja agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik.

Namun, dalam penelitian ini, dampak terhadap tenaga kerja lebih dipahami sebagai kecenderungan yang terlihat dari hasil pengamatan dan situasi operasional di lapangan, sehubungan dengan terbatasnya data kuantitatif yang dapat diakses mengenai jumlah tenaga kerja atau perubahan rinci pada sektor ketenagakerjaan. Meskipun begitu, hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya pada aspek teknis produksi dan operasional perusahaan, tetapi juga terhadap pengelolaan tenaga kerja sebagai bagian vital dalam aktivitas operasional pertambangan.

Analisis Hubungan Antara Variabel

Berdasarkan konseptual penelitian, kebijakan RKAB berfungsi sebagai variabel yang berdiri sendiri yang mempengaruhi kegiatan operasional serta jumlah tenaga kerja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa relasi tersebut memiliki sifat langsung dan signifikan.

Alur hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan RKAB → menetapkan target produksi
- Target produksi → mempengaruhi kegiatan operasional
- Kegiatan operasional → berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja

Tabel 5. Keterkaitan Dampak Kebijakan RKAB terhadap Variabel Penelitian

Variabel	Dampak yang Terjadi	Penjelasan
Kebijakan RKAB	Pembatasan produksi	Penentuan target oleh pemerintah
Produksi	Fluktuasi dan penurunan	Dipengaruhi batas RKAB
Aktivitas Operasional	Penurunan aktivitas	Penyesuaian alat & jam kerja
Tenaga Kerja	Potensi pengurangan	Dampak lanjutan dari operasional

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa kebijakan RKAB memiliki hubungan yang berjenjang dengan variabel-variabel dalam penelitian. Kebijakan RKAB berfungsi sebagai faktor utama yang menentukan target produksi perusahaan.

Selanjutnya, perubahan pada target produksi akan berdampak langsung terhadap aktivitas operasional, seperti penggunaan alat berat, jam kerja, dan intensitas produksi. Dampak tersebut selanjutnya berlanjut pada tenaga kerja, di mana penurunan aktivitas operasional dapat menyebabkan pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Tabel ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bersifat teratur dan saling terkait. Kebijakan RKAB tidak hanya berdampak langsung terhadap produksi, tetapi juga memberikan efek lanjutan terhadap operasional dan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa anggaran memiliki peran penting dalam menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan operasional, sehingga setiap perubahan kebijakan akan berdampak pada aktivitas perusahaan secara keseluruhan (Djamaac et al., 2024). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan RKAB adalah faktor kunci yang mempengaruhi keseluruhan sistem operasional perusahaan pertambangan.

Implikasi Kebijakan RKAB terhadap Perusahaan

Secara keseluruhan, kebijakan RKAB tahunan memberikan tantangan yang cukup besar bagi PT. Borneo Angkasa Jaya dalam menjaga stabilitas operasional. Perubahan sistem dari multi-tahun menjadi tahunan membuat perusahaan harus lebih cepat beradaptasi dalam menyusun rencana produksi, yang sebelumnya bersifat jangka menengah menjadi lebih berfokus pada jangka pendek.

Implikasi utama dari kebijakan ini terlihat pada meningkatnya ketidakpastian dalam penetapan target produksi. Perusahaan tidak lagi memiliki kepastian produksi untuk beberapa tahun ke depan, sehingga strategi operasional harus direncanakan dengan lebih fleksibel dan dinamis mengikuti persetujuan RKAB setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan ini juga mempengaruhi kebutuhan efisiensi operasional. Penurunan target produksi mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk alat berat dan tenaga kerja, agar tetap dapat beroperasi secara efektif dengan kapasitas

produksi yang lebih rendah. Efisiensi ini menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan perusahaan.

Di sisi lain, penyesuaian terhadap tenaga kerja juga menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan. Meskipun tidak selalu berupa pengurangan tenaga kerja secara langsung, perubahan aktivitas operasional berpotensi mempengaruhi pengaturan kerja, pembagian tugas, serta tingkat pemanfaatan tenaga kerja di lapangan. Lebih lanjut, kebijakan RKAB juga bisa mempengaruhi kondisi finansial perusahaan. Penurunan volume produksi dapat membuat pendapatan berkurang, sehingga perusahaan perlu melakukan strategi pengelolaan biaya yang lebih ketat untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Namun demikian, dibalik berbagai tantangan tersebut, kebijakan RKAB juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem operasional dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.

Analisis SWOT terhadap Dampak Kebijakan RKAB

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan internal dan eksternal PT Borneo Angkasa Jaya sebagai akibat dari penerapan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat melihat dengan lebih menyeluruh kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dari faktor internal, serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang muncul dari faktor eksternal karena kebijakan itu.

Tabel 6. Matriks Analisis SWOT PT. Borneo Angkasa Jaya

Internal	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Memiliki pengalaman operasional yang baik	1. Ketergantungan tinggi terhadap RKAB
	2. Mampu mencapai produksi optimal(tahun 2023)	2. Perencanaan produksi kurang stabil
	3. Sistem operasional relatif efisien	4. Fleksibilitas terbatas oleh regulasi
Eksternal	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	1. Mendorong efisiensi operasional	1. Pembatasan produksi yang ketat
	2. Perbaikan manajemen sumber daya	2. Potensi penurunan pendapatan
	3. Peningkatan adaptasi perusahaan	3. Indikasi penyesuaian tenaga kerja

Berdasarkan Tabel diatas, PT. Borneo Angkasa Jaya menunjukkan keunggulan dalam operasional yang efektif dan terbukti mampu mencapai tingkat produksi yang maksimal. Salah satu kekuatan (strengths) yang paling menonjol adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai tingkat produksi optimal pada tahun 2023, yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen dan operasional yang efektif dalam mendukung target produksi. Akan tetapi, satu kelemahan (weakness) utama terletak pada ketergantungan terhadap kebijakan RKAB yang mengakibatkan perencanaan produksi menjadi kurang konsisten. Ketergantungan yang signifikan terhadap RKAB menjadi kelemahan yang paling berpengaruh karena setiap perubahan dalam kebijakan berdampak langsung pada aktivitas operasional perusahaan.

Dari perspektif eksternal, kebijakan RKAB memberikan peluang (opportunities) bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan sumber daya. Peluang paling menarik muncul dari peningkatan adaptasi perusahaan terhadap perubahan kebijakan, yang memungkinkan perusahaan lebih siap dalam menghadapi dinamika regulasi pertambangan di masa depan. Di sisi lain, ada juga ancaman (threats) yang berupa pembatasan produksi yang dapat berpengaruh pada penurunan pendapatan dan potensi pengurangan tenaga kerja. Ancaman yang paling signifikan adalah pembatasan produksi yang ketat karena dapat mempengaruhi tingkat produksi

keseluruhan perusahaan dan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan harus memanfaatkan keunggulan yang ada untuk menghadapi ancaman serta mengoptimalkan peluang untuk mengurangi kelemahan dalam berhadapan dengan kebijakan RKAB yang selalu berubah. Hasil analisis SWOT ini telah diperiksa dan disetujui oleh pihak perusahaan, dan dianggap sesuai dengan situasi operasional yang ada di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak kebijakan rencana kegiatan dan anggaran biaya pada PT. Borneo Angkasa Jaya yang telah dibahas, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM terbukti menjadi faktor eksternal utama yang mempengaruhi aktivitas operasional PT. Borneo Angkasa Jaya. Perubahan sistem RKAB dari multi-tahun menjadi tahunan serta adanya pembatasan target produksi menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian perencanaan secara lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi jangka pendek. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepastian dalam perencanaan produksi jangka menengah, sehingga perusahaan tidak lagi memiliki kestabilan dalam menyusun strategi operasional seperti pada sistem sebelumnya.

Dampak kebijakan RKAB secara langsung tercermin pada kinerja produksi perusahaan yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung menurun pada periode 2024–2025. Penurunan produksi tersebut menunjukkan adanya pengaruh pembatasan kuota produksi yang semakin ketat. Selain itu, perubahan ini juga diikuti oleh penurunan aktivitas operasional di lapangan, seperti berkurangnya intensitas penggunaan alat berat, penyesuaian jam kerja operasional, serta pengaturan ulang tingkat aktivitas pertambangan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan RKAB tidak hanya berdampak pada output produksi, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan proses operasional perusahaan secara menyeluruh.

Kebijakan RKAB juga memberikan dampak tidak langsung terhadap tenaga kerja sebagai akibat dari perubahan aktivitas operasional. Penurunan tingkat produksi dan aktivitas kerja mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti pengurangan jam kerja, optimalisasi pembagian tugas, serta penyesuaian tingkat keterlibatan tenaga kerja di lapangan. Dengan demikian, kebijakan RKAB tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi perusahaan, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja dan keberlangsungan produktivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaac, W., Bakti, R., Agustini, A., Rio, R., & Saputri, R. E. (2024). Analisis Rencana Anggaran Biaya Operasional sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada PT. Trigada Laroiba Mitra. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2548–2556.
- Jurnal News Site. (2026). Kebijakan Menteri ESDM Soal RKAB 2026 Picu Ketidakpastian Usaha.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Lestari, D. (2016). Dampak Investasi Sektor Pertambangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja. *Forum Ekonomi*.
- Latunggamu, O. B., Karamoy, H., & Kalalo, M. (2021). Analisis Anggaran Proyek sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Jurnal EMBA*, 9(2).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Pedoman Penyusunan RKAB Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: KESDM.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2025). Persetujuan RKAB PT Sinar Kumala Naga Tahun 2024–2026.
- Arafat. 2024. Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Literasi Nusantara.
- Stevenson, William J. 2021. *Operations Management*. New York: McGraw-Hill Education.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2016. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 2016. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.